PEMANTAUAN PENGUKURAN KINERJA

2024

DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

DOKUMEN LAPORAN PEMANTAUAN PENGUKURAN KINERJA KEPALA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA TAHUN 2024

BAB I

PENDAHULUAN

Pertanggungjawaban kinerja suatu unit instansi pemerintah kepada atasannya, secara prinsip merupakan kewajiban yang melekat dan perwujudan sikap yang akuntabel terhadap kinerjanya. Pertanggungjawaban ini disampaikan, selain untuk mengidentifikasi hal-hal yang perlu disempurnakan, juga untuk menggambarkan efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas pengembangan kinerja terhadap pencapaian kinerja yang telah dijanjikan.

Dalam Laporan Kinerja Tahun 2024 pada ini disajikan beberapa kondisi, baik yang menggambarkan keberhasilan maupun ketidak berhasilan pencapaian kinerja pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluaraga Berencana Kabupaten Purwakarta sebagaimana tecantum dalam perjanjian kinerja.

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purwakarta dibentuk berdasarkan **Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016,** tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta, selanjutnya ditindaklanjuti dengan **Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 39 tahun 2023** tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purwakarta, sebagai berikut:

KEDUDUKAN

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purwakarta mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan Pemerintah Bidang Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana yang menjadi Kewenangan daerah dan ntugas pembantunya yang diberikan kepada daerah.

TUGAS

Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purwakarta memiliki tugas membantu Bupati melaksanakan urusan Pemerintah Bidang Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana yang menjadi Kewenangan daerah dan tugas pembantunya yang diberikan Kepada daerah.

FUNGSI

Dalam menjalankan tugas pokok sebagaimana tersebut diatas Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purwakarta mempunyai fungsi:

a. Perumusan kebijakn,program dan kegiatan Urusan pemerintah bidang Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana;
b. Pelaksanaan kebijakan,Program dan kegiatan program dan kegiatan urusan pemerintah bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
c. Pelaksanaan evaluasi kebijakan,program dan kegiatan urusan pemerintah bidnag pengendalian penduduk dan keluarga berencana;

d. Pelaksanaan adminsitrasi urusan pemerintah bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana

e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati sesuai lingkup tugas dan fungsi.

BAB II

AKUNTABILITAS KINERJA

A. PERJANJIAN KINERJA

Sebagaimana Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yang ditandatangani antara Bupati Purwakarta dengan Kepala Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purwakarta memuat 2 (Dua) sasaran kinerja Utama dengan 32 (Tiga Puluh dua) indikator kinerja yang ingin dicapai sebagai tolok ukur untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purwakarta.

B. CAPAIAN KINERJA

Berikut adalah ringkasan atas capaian target kinerja pada Tahun 2024 sampai dengan akhir tahun 2024:

Tabel 2.1

Capaian Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purwakarta Berdasarkan Perjanjian Kinerja

SASARAN/KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	Target tahunan	Target Per Triwulan				Realisasi Per Triwulan				Jumlah	Capaian
			I	II	III	IV	I	II	III	IV		
1. Meningkatnya Akuntabitas Publik dan Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Capainsakip Perangkat Daerah	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
	Indek Kepuasan Masyrakat	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik
2. Meningkatnya Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan dan Keluarga Berencana	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	1,35%	0,33%	0,67%	1,01%	1,35%	0,33%	0,67%	1,01%	1,35%		1,35%
3. Meningkatkan Pelayanan dan Pembinaan Keluarga Berencana dan Keluarga Sehat Sejahtera	TFR (Angka Kelahiran Total)	2,33%	0,58%	1,16%	1,74%	2,33%	0,58%	1,16%	1,74%	2,33%		2,33%
	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang menyusun dan memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk	100%	25%	50%	75%	100%	25%	50%	75%	100%		100%
	Rata-rata jumlah anak per keluarga	2,33%	0,58%	1,16%	1,74%	2,33%	0,58%	1,16%	1,74%	2,33%		2,33%
	Persentase Stakeholder/Mitra Kerja dan Masyarakat Diseluruh Tingkat Wilayah Yang Mendapat Pembinaan Advokasi dan KIE	100%	25%	50%	75%	100%	25%	50%	75%	100%		100%
	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (ModernContraceptive PrevalenceRate/mCPR)	70.00%	17,50%	35,00%	52,5%	70,00%	18,00%	37,00%	55,5%	74,00%		74.00%
	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	8.00%	2,00%	4,00%	6,00%	8,00%	1,38%	2,76%	4,14%	5,52%		5.52%
	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan Daerah melalui Kampung KB	100%	25%	50%	75%	100%	25%	50%	75%	100%		100%
	Ratio Akseptor KB	75,49%	18,87%	37,74%	56,61%	75,49%	18,59%	37,18%	55,77%	74,37		74.37%
	Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15 - 49	70.00%	17,50%	35,00%	52,5%	70,00%	18,6%	37,2%	55,8%	74,4%		74.4%
	Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15–19) per 1.000 perempuan usia 15–19 tahun (ASFR 15–19)	24,4%	6,1%	12,2%	18,3%	24,4%	6,1%	12,2%	18,3%	24,4%		24,4%
	Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need)	8%	2,00%	4,00%	6,00%	8,00%	1,38%	2,76%	4,14%	5,52%		5.52%

	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	25,01%	6,25%	12,50%	18,75%	25,01%	3,60%	7,21%	10,81%	14,42		14.42%
	Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi	10,43%	2,60%	5,21%	7,82%	10,43%	1,38%	2,76%	4,14%	5,52%		5.52%
	Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB	95,00%	23,75%	47,5%	71,25	95,00%	16,45%	32,9%	49,35%	65,80%		65.80%
	Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB	65,00%	16,25%	32,5%	48,75%	65,00%	2,57%	5,14%	7,71%	10,29%		10.29%
	Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB	11,30%	2,82%	5,65%	8,47%	11,30%	8,35%	16,71%	25,05%	33,43%		33.43%
	Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan	30,01%	7,50%	15,00%	22,50%	30,01	4,72%	9,44%	14,16%	18,88%		18.88%
	Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi Dan Konseling Remaja/Mahasiswa	535,30%	133,825%	267,65%	401,475%	535,30%	136,7645%	273,529%	410,2935%	547,058%		547.058%
	Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk	100%	25%	50%	75%	100%	25%	50%	75%	100%		100%
	Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri	30,00%	7,50%	15,00%	22,5%	30,00%	7,5%	15,00%	22,5%	30,00%		30,00%
	Rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan	1;1	1;1	1;1	1;1	1;1	1;1	1;1	1;1	1;1		1;1
	Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat	100%	25%	50%	75%	100%	25%	50%	75%	100%		100%
	Persentase Faskes dan jejaringnya (diseluruh tingkatan wilayah) yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan	127,98%	31,995%	63,99%	95,985%	127,98%	31,995%	63,99%	95,985%	127,98%		127,98%
	Persentase pembinaan Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	50,00%	12,5%	25,00%	37,5%	50,00%	12,5%	25,00%	37,5%	50,00%		50,00%
	Cakupan penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di setiap desa	100%	25%	50%	75%	100%	25%	50%	75%	100%		100%
	Persentase remaja yang terkena Infeksi Menular Seksual (IMS)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga	100%	25%	50%	75%	100%	25%	50%	75%	100%		100%
	Cakupan keluarga yang mempunyai balita dan anak yang memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak	60,00%	15,00%	30,00%	45,00%	60,00%	15,00%	30,00%	45,00%	60,00%		60.00%
	Rata-rata usia kawin pertama wanita	19,1%	19,1%	19,1%	19,1%	19,1%	19,1%	19,1%	19,1%	19,1%		19,1%

Tabel 2.2

Capaian Anggaran Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purwakarta Berdasarkan Perjanjian Kinerja

NO	Program	AnggaranRp.	Target				Realisasi				Jumlah	Capaian
			I	II	III	IV	I	II	III	IV		
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA	Rp.7.540.048.231	Rp.1.885.012.057	Rp.1.885.012.057	Rp.1.885.012.057	Rp.1.885.012.057	Rp. 1.373.417.125	Rp.1.654.075.823	Rp.1.881.598.858	Rp.1.602.835.934	Rp.6.511.927.740	86,36%
2	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Rp.366.000.000	Rp.91.500.000	Rp.91.500.000	Rp.91.500.000	Rp.91.500.000	Rp. 0.00	Rp.23.398.000	Rp.94.424.000	Rp.211.736.000	Rp.329.558.000	90.04%
3	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB	Rp.8.643.660.000	Rp.2.160.915.000	Rp.2.160.915.000	Rp.2.160.915.000	Rp.2.160.915.000	Rp. 411.703.378	Rp.2.292.074.553	Rp.1.768.512.751	Rp.3.929.183.002	Rp.8.401.473.684	97.19%
4	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA(KS)	Rp.5.620.900.000	Rp.1.405.000.000	Rp.1.405.000.000	Rp.1.405.000.000	Rp.1.405.000.000	Rp. 66.387.000	Rp.1.050.680.000	Rp.1.551.107.000	Rp.2.785.230.000	Rp.5.453.404.000	97.02%
JUMLAH		**Rp.22.170.608.231**									**Rp.20.696.363.424**	**93.35%**

C. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA

Dalam rangka mendorong pelaksanaan pencapaian target dalam sasaran strategis sebagaimana diuraikan dalam perjanjian kinerja, maka berikut adalah uraian capaian dari masing- masing sasaran strategis berserta indikatornya, sebagai berikut:

1. Meningkatnya frekuensi pelayanan sesuai standar pelayanan minimal dengan target kinerja dengan Indikator Kinerja Persentase;
2. Capaian SAKIP Perangkat Daerah pada tahun 2023 telah melampaui target A dengan capaian sebesar 80,10 %;
3. Indek Kepuasan Masyarakat Telah terealisasai dengan target (B) pada tahun 2024 .
4. Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) dengan target 1,35% telah terealisasi sebesesar 1,35% dengan Perhitungan langsung dari BKKBN Provinsi Jawa Barat
5. TFR (Angka Kelahiran Total) pada tahun 2024 di targetkan pada angka 2,33% dengan terealisasi 2,33% dengan perhitungan langsung dari BKKBN Pewakilan Provinis Jawa Barat
6. Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang menyusun dan memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk sudah terealisasi 100% pada tahun 2024
7. Rata-rata jumlah anak per keluarga pada target tahun 2024 2,33% karen indikator tersebut hampir sama dengan indikator TFR maka realisasi pada tahun 2024 2,33%
8. Persentase Stakeholder/Mitra Kerja dan Masyarakat Diseluruh Tingkat Wilayah Yang Mendapat Pembinaan Advokasi dan KIE Pada Indikator tersebut sudah terealisasi 100%
9. Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR) dengan target 70% dengan terealisai sebesar 74% maka pada tahun 2024 target tersebut sangat melampaui apa yang di targetkan pada tahun 2024.
10. Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) pada indikator tersebut terealisasi sangat siginifkan dari target 8.00% teralisasi dengan angka 5.52% di karenakan indikator tersebut harus menurun setiap tahunnya.
11. Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan Daerah melalui Kampung KB dengan taregt 100% dan terealisasi hampir sempuran yaitu 100% pada indikator tersebut.
12. Ratio Akseptor KB dengan target 75.49% dengan trealisasi pada tahun 2024 74.37 pada indikator tersebut ada penurunan sedikit dikarenakan berbagai faktor yang terjadi dilapangan.

13. Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15 – 49 dengan target 70% dan terealisasi pada tahun 2024 yaitu sebesar 74.4%
14. Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15–19) per 1.000 perempuan usia 15–19 tahun (ASFR 15–19) dengan target pada tahun 2024 pada angka 24.4% dan terealisasi 24.4%
15. Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need) dengan taregt hampir sama dengan indikator no 9 yaitu target tahun 2024 8.00% dan terealisasi di angka 5.52%
16. Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) dengan target 25.01% dan terealisasi pada angka 14.42 pada tahun 2024 target teresebut tidak tercapai karena ada beberapa faktor atau kendala yang terjadai di lapangan
17. Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi dengan taregt pada tahun 2024 di angka 10,43% dan terealisasi di angka 5.52% karena indikator teresebut hampir sama dengan indikator no 9 yang perhitungannya di bagi unnmetned dan jumlah pus
18. Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB dengan target 95% dengan terealisasi pada tahun 2024 65.8%
19. Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB dengan taregt 65% dan terealisasi pada tahun 2024 di angka 10.29%
20. Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB dengan target 11.30 dan terealisasi pada tahun 2024 di angka 11.30%
21. Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan dengan target 30.01% dam terealisasi pada angka 18.88% pada tahun 2024
22. Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi Dan Konseling Remaja/Mahasiswa dengan target 535.30% dengan terealisasi 547.058% pada tahun 2024
23. Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk dengan target 100% dan terealisasi 100% pada Tahun 2024
24. Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri
25. Rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan dengan taregt 1:1 dengan terealisasi 1:1:6
26. Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat

27. Persentase Faskes dan jejaringnya (diseluruh tingkatan wilayah) yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan
28. Persentase pembinaan Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
29. Cakupan penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di setiap desa
30. Persentase remaja yang terkena Infeksi Menular Seksual (IMS) dengan target 0 dan terealisasi 0%
31. Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga terealisasai 100%
32. Cakupan keluarga yang mempunyai balita dan anak yang memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak
33. Rata-rata usia kawin pertama wanita dengan taregt 19,1 dan terealisasi 19,1% pada tahun 2024.

D. RENCANA TINDAK LANJUT.

Adapun rencana tindak lanjut yang harus dilakukan agar dapat meningkatkan capaian sehingga sesuai dengan target yg telah ditetapkan,adalah sebagai berikut :

1. Untuk indikator Rasio Petugas Lapangan Keluarga Berencana/ Penyuluh Keluarga Berencana (PLKB/PKB) akan ditingkatkan dengan Pemenuhan Kouta petugas Lini lapangan dengan pengajuan permohonan penamabahan anggaran karena untuk saat ini petugas lini lapangan masih kurang dengan perbandingan 1 petugas memegang 3 Desa;
2. Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya dibawah usia 20 tahun/menin gkatkan rata rata usia kawin dengan meningkatkan kinerja dengan mengikuti kegiatan sosialisasi, pembinaan dan pelatihan Pembinaan remaja dan pentingnya reproduksi serta pembentukan forum remaja sampai dengan tingkat desa;
3. Cakupan jumlah pelayanan kontrasepsi dengan cara meningkatkan pendampingan calon aseptor dan Meningkatkan Komunikasi Informasi Eduksai (KIE) di setiap pelosok desa;
4. Meningkatkan Manajemen Internal Perangkat Daerah agar tercapai Nilai SAKIP Perangkat Daerah serta perlunya studi komparasi ke Daerah yg Nilai Sakip lebih dari KabupatenPurwakarta .

E. TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG.

	Laporan kurang baik
	Laporan sudah baik
	Target dan realisasi diteliti ulang Capaian diteliti ulang
	Lain-lain.....

BAB III

PENUTUP

Laporan Kinerja Triwulan I II III dan IV Tahun 2024

1. Secara umum pelaksanaan tugas poko dan fungsi kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purwakarta berdasarakan pertauran Bupati Nomor 39 tahun 2023 telah dilaksanakan sebagaimana mestinya
2. Presentase serta seluruh indikator kinerja dengan triwulan I II III dan IVmemenuhi target dengan kategori tinggi pada tahun 2024
3. Untuk indikator Rasio Petugas Lapangan Keluarga Berencana/ Penyuluh Keluarga Berencana (PLKB/PKB) akan ditingkatkan dengan Pemenuhan Kouta petugasLini lapangan dengan pengajuan permohonan penamabahan anggaran karena untuk saat inipetugas lini lapangan masih kurang dengan perbandingan 1 petugas memegang 3 Desa;
4. Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya dibawah usia 20 tahun/menin gkatkan rata rata usia kawin dengan meningkatkan kinerja dengan mengikuti kegiatan sosialisasi, pembinaan dan pelatihan Pembinaan remaja dan pentingnya reproduksi serta pembentukan forum remaja sampai dengan tingkat desa;
5. Cakupan jumlah pelayanan kontrasepsi dengan cara meningkatkan pendampingan calon aseptor dan Meningkatkan Komunikasi Informasi Eduksai (KIE) di setiap pelosok desa;
6. Meningkatkan Manajemen Internal Perangkat Daerah agar tercapai Nilai SAKIP Perangkat Daerah serta perlunya studi komparasi ke Daerah yg Nilai Sakip lebih dari Kabupaten Purwakarta .

Purawakrta, Desember 2024

Kepala Dinas Pengendalian
Pendudukdan Keluarga Berencana
Kabupaten Purwakarta

H.YAYAT HIDAYAT,S.Sos
NIP.197002151997031009

DOKUMEN LAPORAN PEMANTAUAN PENGUKURAN KINERJA SEKRETARIS DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGABERENCANA KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2024

BAB I PENDAHULUAN

Pertanggung jawaban kinerja suatu unit instansi pemerintah kepada atasannya, secara prinsip merupakan kewajiban yang melekat dan perwujudan sikap yang akuntabel terhadap kinerjanya. Pertanggungjawaban ini disampaikan, selain untuk mengidentifikasi hal-hal yang perlu disempurnakan, juga untuk menggambarkan efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas Bagian Pengembangan Kinerja terhadap pencapaian kinerja yang telah dijanjikan.

Dalam Laporan Kinerja Tahun 2024 pada triwulan I II III Dan IV ini disajikan beberapa kondisi, baik yang menggambarkan keberhasilan maupun ketidak berhasilan pencapaian kinerja pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarag Berencana Kabupaten Purwakarta sebagaimanatecantum dalam perjanjian kinerja.

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarag Berencana Kabupaten Purwakarta dibentuk berdasarkan **Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016,** tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta, selanjutnya ditindaklanjuti dengan **Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 39 tahun 2023** tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarag Berencana Kabupaten Purwakarta, sebagai berikut:

TUGAS POKOK DAN WEWENANG

Merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan memberikan dukungan pelayanan teknis di bidang admistrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan perencanaan, keuangan serta pelaporan kinerja dan anggaran pada unit organisasi di lingkungan dinas;

FUNGSI

Dalam menjalankan tugas pokok sebagaimana tersebut diatas Dinas PengendalianPenduduk dan Keluarag Berencana Kabupaten Purwakarta mempunyai fungsi sebagai berikut:

a. Penyelenggaraan pengkajian program kerja sekretariat dan bahan perumusan kebijakan teknis kesekretariatan di bidang penyusunan perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian;
b. Penyelenggaraan pengkajian bahan bimbingan teknis di bidang penyusunan perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian;

c. Penyelenggaraan pengendalian administrasi keuangan, administrasi kepegawaian, ketatausahaan,kelembagaan dan ketatalaksanaan;
d. Penyelenggaraan pengkajian rumusan kebijakan anggaran;
e. Penyelenggaraan pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
f. Penyelenggaraan pengelolaan dokumentasi peraturan perundang-undangan, danhubungan masyarakat;
g. Penyediaan pengelolaan naskah dinas dan kearsipan;
h. Penyelenggaraan pengkajian bahan pembinaan jabatan fungsional;
i. Penyelenggaraan pengkajian bahan perumusan rencana strategis, LAKIP, LPPD, LKPJ Dinas;
j. Penyeliaan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
k. Penyelenggaraan koordinasi dengan unit kerja terkait;
l. Penyelenggaraan pengkajian bahan fasilitasi di bidang penyusunan perencanaan, keuangan, umumdan kepegawaian.
m. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepal
n. a Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB II

AKUNTABILITAS KINERJA

A. PERJANJIAN KINERJA

Sebagaimana Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yang ditandatangani antara Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarag Berencana Kabupaten Purwakarta dengan Sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarag Berencana Kabupaten Purwakarta. Adapun Perjanjian Kinerja dimaksud memuat 1 sasaran kinerja Utama dengan 1 indikator kinerja yang ingin dicapai sebagai tolok ukur menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan Tujuan dan Sasaran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purwakarta.

B. CAPAIAN KINERJA

Berikut adalah ringkasan atas capaian target kinerja yang dihasilkan pada Triwulan I II III dan IV tahun 2024:

Tabel 2.1

Capaian Kinerja Sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purwakarta Berdasarkan Perjanjian Kinerja

SASARAN/KINERAUTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	Target tahunan	Target Triwulan				Realisasi Triwulan				Jumlah	Capaian
			I	II	III	IV	I	II	III	IV		
Meningkatnya Akuntabitas Publikasi dan Kepuasan Masyarakat	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen			2				2		2	100%
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 laporan	1				1				1	100%
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 laporan			4				4		4	100%
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	34 orang/Bulan	34	34	34	34	34	34	34	34	34	100%
	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan		1	1			1	1		1	100%
	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	4				4				4	100%
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	5				5				5	100%

	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	8 Paket		8				8			8	100%
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 paket	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100%
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	7 Paket			1	6			1	6	7	100%
	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	2 laporan	1				1				1	22,5%
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan			8	2			8	2	10	60%
	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	6 unit			6				6		6	100%
	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	8 Unit		7	1			7	1		8	100%
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1		1		1		1		2	100%
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	5	5	1	1	5	5	1	1	12	100%
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	4	4	3	1	4	4	3	1	12	100%
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5 unit		4		1		4		1	5	100%
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	114 unit		13	2	57		13	2	57	72	63%
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 unit		1	1				1	1	2	100%
	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	41 Unit				17				17	17	46%

Tabel 2.2

Capaian Anggaran

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purwakarta Berdasarkan Perjanjian Kinerja

NO	Kegiatan	Anggaran Rp.	Target Tribulanan				Realisasi Tribulanan				Jumlah	Capaian
			I	II	III	IV	I	II	III	IV		
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp.37.798.200	Rp.9.449.550	Rp.9.449.550	Rp.9.449.550	Rp.9.449.550	Rp.9.449.550	Rp.9.449.550	Rp.9.449.550	Rp.9.449.550	Rp.37.798.200	100%
2	Administrasi Keuangan Daerah	Rp.6.020.646.564	Rp1.505.161.641	Rp1.505.161.641	Rp1.505.161.641	Rp1.505.161.641	Rp1.505.161.641	Rp1.505.161.641	Rp1.505.161.641	Rp1.505.161.641	Rp.6.020.646.564	100%
3	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Rp.12.575.000	Rp.3.143.750	Rp.3.143.750	Rp.3.143.750	Rp.3.143.750	Rp.3.143.750	Rp.3.143.750	Rp.3.143.750	Rp.3.143.750	Rp.12.575.000	100%
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp.295.406.489	Rp.73.851.622	Rp.73.851.622	Rp.73.851.622	Rp.73.851.622	Rp.73.851.622	Rp.73.851.622	Rp.73.851.622	Rp.73.851.622	Rp.295.406.489	100%
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp.261.192.000	Rp.65.298.000	Rp.65.298.000	Rp.65.298.000	Rp.65.298.000	Rp.65.298.000	Rp.65.298.000	Rp.65.298.000	Rp.65.298.000	Rp.261.192.000	100%
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp.521.995.478	Rp.130.498.869	Rp.130.498.869	Rp.130.498.869	Rp.130.498.869	Rp.130.498.869	Rp.130.498.869	Rp.130.498.869	Rp.130.498.869	Rp.521.995.478	100%
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp.390.434.500	Rp.97.608.625	Rp.97.608.625	Rp.97.608.625	Rp.97.608.625	Rp.97.608.625	Rp.97.608.625	Rp.97.608.625	Rp.97.608.625	Rp.390.434.500	100%
JUMLAH		Rp. 7.540.048.231										

C. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA

Dalam rangka mendorong pelaksanaan pencapaian target dalam sasaran strategis sebagaimana diuraikan dalam perjanjian kinerja, maka berikut adalah uraian sasaran strategis yaitu Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota.

1. Seluruh Target sudah dilaksanakan sesuai dengan target per triwulan dengan target hasil akhir mencapai target pada dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2. Mengevaluasi setiap indikator yang sudah dilaksanakan perteriwulan maupun akhir tahun untuk menimbang keberhasilan target tersebut pada Dinas Pengendalian Penduduk dan keluarga berencana

D. RENCANA TINDAK LANJUT.

Demi Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota dengan indikator sebagai berikut:

1. Melakukan perbaikan terhadap dokumen perencanaan apabila ada penambahan paguindikatif pada penganggaran tahun berjalan (PAPBD);
2. Membuat laporan keuangan pada capaian kinerja setiap bulan mengikuti laporan keuangan yang sudah ada;
3. Capaian kinerja untuk terpenuhinya administrasi kepegawaian dengan baik dibuat pertriwulan mengikuti pengukuran kinerja;

E. TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG.

	Laporan kurang baik
	Laporan sudah baik
	Target dan realisasi diteliti ulang Capaian diteliti ulang
	Lain-lain.....

BAB III
PENUTUP

Demikian Kinerja triwulan I II III dan IV tahun 2024 Sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana kabupaten Purwakarta berfungsi sebagi evaluasi dan pemantuanterhadap kegiatan dan sasaran yang telah di tetapkan adapun laporan kinerja triwulan I II III dan IV tahun 2023 secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekertaris Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencan Kabupaten Purwakarta berdasarkan perturan Bupati Nomor 39 Tahun 2023 telah dilaksanakan sebagaiman mestinya serta nilai Sakip Perangkat Daerah pada Triwulan I II III dan IV sehingga perencanaan tercapai yang di tetapkan.

Sekretaris
Dinas Pengendalian Penduduk
Dan Keluarga Berencana
Kabupaten Purwakarta

dr.H ASEP SAEPUDIN, MH, Kes
NIP.197711282007011002

DOKUMEN LAPORAN PEMANTAUAN PENGUKURAN KINERJA
BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2024

BAB I
PENDAHULUAN

Pertanggung jawaban kinerja suatu unit instansi pemerintah kepada atasannya, secara prinsip merupakan kewajiban yang melekat dan perwujudan sikapyang akuntabel terhadap kinerjanya. Pertanggungjawaban ini disampaikan, selain untuk mengidentifikasi hal-hal yang perlu disempurnakan, juga untuk menggambarkan efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas Bagian Pengembangan Kinerja terhadap pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan.

Dalam Laporan Kinerja Tahun 2023 ini disajikan beberapa kondisi, baik yang menggambarkan keberhasilan maupun ketidak berhasilan pencapaian kinerja BidangPengendalian Penduduk pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purwakarta sebagaimana tecantum dalam perjanjian kinerja. Bidang Pengendalian Penduduk pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purwakarta dibentuk berdasarkan **PeraturanDaerah KabupatenPurwakarta Nomor 9 Tahun 2016** tentang Pembentukan danSusunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan selanjutnya ditindak lanjutidengan **Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 39 tahun 2023** tentang Kedudukan,Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencan kabupaten Purwakarta sebagai berikut:

Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas;

1. Perumusan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pengendalian penduduk dan advokasi
2. Pengimplementasian kebijakan, program dan kegiatan pengendalian penduduk dan advokasi;
3. Pemantauan,pelaporan dan evaluaasi kebijakn program dan kegiatanpengendalian penduduk dan advokasi

4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan kepal Dinas terkait dengan tugas dang fungsinya.

Fungsi Bidang Pengendalian ;

1. Menyusun rencana kerja bidang pengendalian penduduk dan advokasi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2. Mengkoordinasikan tugas internal dilingkup bidang pengendalian penduduk dan advokasi;
3. Merumuskan bahan kebijakan dan pembinaan teknis sebagai pedoman operasional penyelenggaraan pengendalian penduduk dan advokasi;
4. Merumuskan kebijakan teknis tentang penyeraasian kebijakan pengendalian penduduk terpadu antara perkembangan kependudukan (aspek kuantitas, kualitas dan mobalitas) dengan pembangunan di bidang ekonomi, sosial budaya dan lingkungan di daerah akbupaten;
5. Melakukan sosialisasi, fasilitasi, supervise, advokasi dan konsulatasi penyelenggaraan pengendalian penduduk dan advokasi;
6. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaoran pelaksnaan kebijakan pemerintahan daerah dalm hal merumuskan kebijakan pelaksanaan pengendalian penduduk dan advokasi skala kabupaten;
7. Merumuskan kebijakan norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) pengendalian penduduk dan advokasi skala kabupaten;
8. Melaksnakan peningkatan kerjasma antara instansi, Lembaga, mitra kerja dalam hal kebijakan dan pemetaan perkiraan pengendalian penduduk, pengelola data, pelaporan advokasi dan komunikasi informasi edukasi skala kabupaten
9. Melaksanakan pengolahan data, informasi kependudukan dan keluarga berencana kabupaten; dan;
10. Melaksnakan pemanfaatan operasional jaringan komunikasi pengolahan data dan informasi dalam pelaksanaan E-Government dan melakukan disseminasi informasi.

BAB II

AKUNTABILITAS KINERJA

A. PERJANJIAN KINERJA

Sebagaimana Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yang ditandatangani antara Kepala Bidang Pengendalian penduduk Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purwakarta 1 sasaran kinerja utama yaitu Meningkatnya Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan dan Keluarga Berencana, dengan 5 indikator kinerja utama yaitu

1. Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)
2. TFR (Angka Kelahiran Total)
3. Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang menyusun dan memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk
4. Rata-rata jumlah anak per keluarga
5. Persentase Stakeholder/Mitra Kerja dan Masyarakat Diseluruh Tingkat Wilayah Yang Mendapat Pembinaan Advokasi dan KIE

yang ingin dicapai sebagai tolok ukur penilaian keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan Tujuan dan Sasaran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purwakarta.

B. CAPAIAN KINERJA

Berikut adalah ringkasan atas capaian target kinerja yang dihasilkan pada TriwulanI II III dan IV Tahun 2024.

Tabel 2.1

Capaian Kinerja
Bidang Pengendalian Penduduk
Kabupaten Purwakarta Berdasarkan Perjanjian Kinerja
Tahun 2024 sebagai berikut :

SASARAN/KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUNAN	Target Per Tribulan				Realisasi Per Tribulan				Jumlah	Capaian
			I	II	III	IV	I	II	III	IV		
MengendalikanJumlah Penduduk melalui Program KKBPK	Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	1 dokumen			1				1		1 dokumen	100%
	Jumlah pelaksanaan Sarasehan Hasil PemutakhiranData Keluarga	1 laporan				1				1	1 laporan	100%
	Jumlah Laporan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana (PembangunanKeluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	1 laporan			1				1		1 laporan	100%
	Jumlah Dokumen Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	1 laporan				1				1	1 laporan	100%
	Jumlah Laporan hasil Pelaksanaan Pembinaan dan pengawasan Program Bangga Kencana	1 laporan			80	20			80	20	1 laporan	100%
	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	2 Dokumen			2				2		2 Dokumen	100%

Tabel 2.2
Capaian
Anggaran Bidang Pengendalian Penduduk Kabupaten Purwakarta Tahun 2024

NO	KEGIATAN	AnggaranRp.	Target				Realisasi				Jumlah	Capaian
			I	II	III	IV	I	II	III	IV		
1	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Rp.145.000.000			57.644.000	86.912.000			57.644.000	86.912.000	144.556.000	99.69%
	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Rp.211.000.000	34.039.000	38.248.000	13.630.000	99.100.000	34.039.000	38.248.000	13.630.000	99.100.000	185.017.000	87.68%
JUMLAH		Rp.356.000.000									329.573.000	92.57%

C. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA

Dalam rangka mendorong pelaksanaan pencapaian target dalam sasaran strategis sebagaimana diuraikan dalam perjanjian kinerja, maka berikut adalah uraian sasaran strategis yaituMengendalikan Jumlah Penduduk melalui Program KKBPK..

1. Seluruh Target sudah dilaksanakan sesuai dengan target per triwulan dengan target hasil akhir mencapai target pada dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

2. Mengevaluasi setiap indikator yang sudah dilaksanakan perteriwulan maupun akhir tahun untuk menimbang keberhasilan target tersebut pada Dinas Pengendalian Penduduk dan keluarga berencana

D. RENCANA TINDAK LANJUT

Demi Program Pengendalian Penduduk Pada Dinas Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purwakarta sebagai berikut :

1. Melakukan perbaikan terhadap dokumen Pengendalian Penduduk dan Menginflementasikan setiapandokumen yang sudah terbuat;

2. Membuat laporan keuangan pada capaian kinerja setiap bulan me ngikuti laporan keuangan yangsudah ada;

3. Capaian kinerja untuk terpenuhinya administrasi kepegawaian dengan baik dibuat per triwulan mengikuti pengukuran kinerja;

E. TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG

	Laporan kurang baik
	Laporan sudah baik
	Target dan realisasi diteliti ulang Capaian diteliti ulang
	Lain-lain.....

BAB III

PENUTUP

Laporan Kinerja Triwulan Tahun 2024:

1. Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bidang Pengendalian Penduduk Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana kabupaten purwakarta berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2023 akan dilaksanakan sebagaimana jadwal yang sudah ditentukan.
2. Dalam pencapaian sasaran yang diperjanjikani, rata-rata pencapaian belum mencapai target karena kegiatan dilaksanakan pada Triwulan I II III dan Triwulan IV.

Purwakarta Desember 2024
Plt.Kepala Bidang Pengendalian Penduduk

MUHAMAD IQBAL TAWAKAL,S.Farm,Apt.MM
NIP.198603032009021003

BAB I

PENDAHULUAN

Pertanggung jawaban kinerja suatu unit instansi pemerintah kepada atasannya, secara prinsip merupakan kewajiban yang melekat dan perwujudan sikap yang akuntabel terhadap kinerjanya. Pertanggung jawaban ini disampaikan, selain untuk mengidentifikasi hal-hal yang perlu disempurnakan, juga untuk menggambarkan efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas Bagian Pengembangan Kinerja terhadap pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan.

Dalam Laporan Kinerja Tahun 2023 ini disajikan beberapa kondisi, baik yang menggambarkan keberhasilan maupun ketidak berhasilan pencapaian kinerja Bidang Keluarga Berencana pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purwakarta sebagaimana tecantum dalam perjanjian kinerja.

Bidang Keluarga Berencana pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purwakarta dibentuk berdasarkan **Peraturan Daerah KabupatenPurwakarta Nomor 9 Tahun 2016** tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan selanjutnya ditindak lanjuti dengan **Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 39 tahun 2023** tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencan kabupaten Purwakarta sebagai berikut:

Tugas Pokok dan Fungsi

TUGAS ;

1. Perumusan kebijakan, program dan kegiatan keluarga berencana;
2. Pengimplementasian kebijakan, program, dan kegiatan keluarga berencana;
3. Pemantauan, pelaporan, dan evaluasi implementasi kebijakan, program dan kegiatan bidang keluarga berencana;
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan kepala dinas terkait tugas dan fungsinya.

Fungsi Bidang Pengendalian ;

1. Menyusun rencana kerja bidang keluarga berencana sebagai pedoman pelaksanaan kerja;
2. Mengkoordinasikan tugas internal di lingkup bidang keluarga berencana;
3. Merumuskan bahan kebijakan dan pembinaan teknis sebagai pedoman operasional penyelenggaraan keluarga berencana;
4. Merumuskan kebijakan teknis dalam penetapan dan pengembangan jaringan pengelolaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi, jaminan pelayanan KB, serta binakesertaan KB dan penggerakan institusi masyarakat desa dalam pengendalian penduduk, keluarga berencana di klinik KB, jejaring pelayanan KB dan pelayanan KB rumah sakit (PKBRS);
5. Mengkoordinasikan dan melaporkan pelaksanaan tugas bidang keluarga berencana;
6. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan tugas bidang keluarga berencana;
7. Merumuskan kebijakan norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) dalam keluargaberencana;
8. Menetapkan perkiraan kebutuhan alat dan obat kontrasepsi untuk pelayanan KB di klinik KB, jejaring pelayanan KB dan pelayanan KB rumah sakit (PKBRS);
9. Menetapkan sasaran pelayanan KB, sasaran peningkatan partisipasi pria, "Unmeet Need", sasaran penanggulangan masalahreproduksi serta sasaran kelangsungan hidupibu, bayi dan anak (KHIBA) skala kabupaten;
10. Melaksanakan penyerasian dan penetapan kriteria serta kelayakan tempat pelayanan KB dan Kesehatan reproduksi, peningkatan partisipasi pria, penanggulangan masalahreproduksi serta ke;langsungan hidup ibu, bayi dan anak (KHIBA) skala kabupaten; dan
11. Merumuskan kebijakan teknis pengembangan penguatan kelembagaan keluarga kecilberkualitas dan jejaring program skala kabupaten.

BAB II

AKUNTABILITAS KINERJA

A. PERJANJIAN KINERJA

Sebagaimana Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yang ditandatangani antara Kepala Bidang Keluarga Berencana dan kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purwakarta 1 sasaran kinerja utama yaitu Meningkatnya Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan dan Keluarga Berencana, dengan 19 indikator kinerja utama yaitu;

1. Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/CPR)
2. Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)
3. Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan Daerah melalui Kampung KB
4. Ratio Akseptor KB
5. Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15 – 49
6. Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15–19) per 1.000 perempuan usia 15–19 tahun (ASFR 15–19)
7. Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need)
8. Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)
9. Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi
10. Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB
11. Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB
12. Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB
13. Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan
14. Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi Dan Konseling Remaja/Mahasiswa
15. Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk
16. Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri

17. Rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan
18. Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat
19. Persentase Faskes dan jejaringnya (diseluruh tingkatan wilayah) yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan

yang ingin dicapai sebagai tolok ukur penilaian keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan Tujuan dan Sasaran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purwakarta.

B. CAPAIAN KINERJA

Berikut adalah ringkasan atas capaian target kinerja yang dihasilkan pada TriwulanI II III dan IV Tahun 2024

Tabel 2.1

Capaian Kinerja Bidang Keluarga Berencana Kabupaten PurwakartaBerdasarkan Perjanjian

Kinerja Tahun 2024 sebagai berikut :

SASARAN/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUNAN	Target Per Triwulan				Realisasi Per Tribulan				Jumlah	Capaian
			I	II	III	IV	I	II	III	IV		
Meningkatnya Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan dan Keluarga Berencana	Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan	1			1					1		100 %
	Jumlah Unit Sarana Penyediaan dan Pendistribusian KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	2		1	1					2		100 %
	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	1			1					1		100 %
	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	1		1						1		100 %
	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	500								500		100 %
	Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	70								70		100 %
	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	74								74		100 %

	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	4445								4445		100 %
	Jumlah Laporan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	250								0		100 %
	Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	30								30		100 %
	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	6	2	1	2	1	2	1	2	1		100 %
	Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	3		1	1	1		1	1	1		100 %

Tabel 2.2

Capaian Anggaran Bidang Keluarga Berencana Kabupaten Purwakarta Tahun 2024

NO	KEGIATAN	Anggaran Rp.	Target				Realisasi				Jumlah	Capaian
			I	II	III	IV	I	II	III	IV		
1	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Rp.877.600.000	219.400.000	219.400.000	219.400.000	219.400.000	214.473.296	214.473.296	214.473.296	214.473.296	Rp.857.893.187	97.75%
2	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Rp.2.439.360.000	609.840.000	609.840.000	609.840.000	609.840.000	607.890.625	607.890.625	607.890.625	607.890.625	Rp2.431.562.500	99.68%
3	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi sertaPelaksanaan Pelayanan KB di daerah Kabupaten/Kota	Rp.4.101.950.000	1.025.487.500	1.025.487.500	1.025.487.500	1.025.487.500	985.459.499	985.459.499	985.459.499	985.459.499	Rp.3.941.837.998	96.09%
4	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan	Rp.1.224.750.000	306.187.500	306.187.500	306.187.500	306.187.500	285.795.000	285.795.000	285.795.000	285.795.000	Rp.1.143.180.000	93.33%
JUMLAH		**8.643.660.000**									Rp.8.374.473.685	96.88%

C. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA

Dalam rangka mendorong pelaksanaan pencapaian target dalam sasaran strategis sebagaimana diuraikan dalam perjanjian kinerja, maka berikut adalah uraian sasaran strategis yaitu Meningkatkan frekuensi pelayanan sesuai standar pelayanan minimal.

a. Seluruh Target sudah dilaksanakan sesuai dengan target per triwulan dengan target hasil akhir mencapai target pada dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

b. Mengevaluasi setiap indikator yang sudah dilaksanakan perteriwulan maupun akhir tahun untuk menimbang keberhasilan target tersebut pada Dinas Pengendalian Penduduk dan keluarga berencana.

D. RENCANA TINDAK LANJUT.

Demi Meningkatkan frekuensi pelayanan sesuai standar pelayanan minimal dengan tindak Lanjut sebagi berikut sebagai berikut :

a. Melakukan perbaikan terhadapterhadap pelayan Keluarga Berencana

b. Melakukan usulan penmabahn Anggaran terhadap petuga lini lapangan dengan hanyaperbadingan rasio 1:1,6 yang seharusnya 1:1 di setiap desa yang ada di Kabupaten Purwakarta);

c. Membuat laporan keuangan pada capaian kinerja setiap bulan mengikuti laporankeuangan yang sudah ada;

d. Capaian kinerja untuk terpenuhinya Program Keluarga berencana dengan baik dibuatper triwulan mengikuti pengukuran kinerja;

E. TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG

	Laporan kurang baik
	Laporan sudah baik
	Target dan realisasi diteliti ulang Capaian diteliti ulang
	Lain-lain.....

BAB III

PENUTUP

Laporan Kinerja Triwulan Tahun 2024:

1. Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bidang Keluarga Berencana pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana kabupaten purwakarta berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2023 akan dilaksanakan sebagaimana jadwal yang sudah ditentukan.
2. Dalam pencapaian sasaran yang diperjanjikani, rata-rata pencapaian belummen capai target karena kegiatan dilaksanakan pada Triwulan I II III dan Triwulan IV.

Purwakarta Desember 2024

KEPALA
BIDANG KELUARGA BERENCANA

Drs.IDI JUNAEDI,MM
NIP.196712061993121001

BAB I
PENDAHULUAN

Pertanggung jawaban kinerja suatu unit instansi pemerintah kepada atasannya, secara prinsip merupakan kewajiban yang melekat dan perwujudan sikapyang akuntabel terhadap kinerjanya. Pertanggung jawaban ini disampaikan, selain untuk mengidentifikasi hal-hal yang perlu disempurnakan, juga untuk menggambarkan efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas Bagian Pengembangan Kinerja terhadap pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan.

Dalam Laporan Kinerja Tahun 2024 ini disajikan beberapa kondisi, baik yang menggambarkan keberhasilan maupun ketidak berhasilan pencapaian kinerja BidangPembangunan Ketahanan Keluarga pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purwakarta sebagaimana tecantum dalam perjanjian kinerja.

Bidang Pembangunan Ketahanan Keluarga pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purwakarta dibentuk berdasarkan **Peraturan Daerah KabupatenPurwakarta Nomor 9 Tahun 2016** tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan selanjutnya ditindak lanjuti dengan **Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 39 tahun 2023** tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencan kabupaten Purwakarta sebagai berikut:

Tugas Pokok dan Fungsi

Fungsi;

1. Perumusan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan ketahanan keluarga;;
2. Pengimplementasian kebijakan, program dan kegiatan pembangunan ketahanankeluarga;
3. Pemantauan, pelaporan, dan evaluasi implementasi kebijakan, program dan kegiatanbidang pembangunan ketahanan keluarga; dan
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan kepada dinas terkait dengan yugas dan

Tugas :

1. Menyusun rencana kerja bidang pembangunan ketahanan keluarga ;
2. Mengkoordinasikan tugas internal di lingkup bidang pembangunan ketahanan keluarga,
3. Merumuskan bahan kebijakan dan pembinaan teknis sebagai pedoman operasional

penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga;

4. Perumusan, kebijakan, standar, proseedur, kriteia (NSPK) dalam Pngembangan Pembangunan Ketahanan Keluarga;
5. Merumuskan kebijakan teknis penetapan sasaran Pembangunan Ketahanan Keluarg,skala Kabupaten;
6. Penyusunan kebijakan pengembangan penguatan kelembagaan ketahanan kelurgadan jejaring program kemitraan skala kabupaten;
7. Penyusunan petunjuk teknis PembangunanKetahanan Keluarga; dan
8. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas Bidang PembanguananKetahanan Keluarga.

BAB II

AKUNTABILITAS KINERJA

A. PERJANJIAN KINERJA

Sebagaimana Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yang ditandatangani antara Kepala Bidang Pembangunan ketahanan keluarga dan kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purwakarta 1 sasaran kinerja utama yaitu Meningkatnya Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan dan Keluarga Berencana, dengan 6 indikator kinerja utama yaitu;

1. Persentase pembinaan Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
2. Cakupan penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di setiap desa
3. Persentase remaja yang terkena Infeksi Menular Seksual (IMS)
4. Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga
5. Cakupan keluarga yang mempunyai balita dan anak yang memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak
6. Rata-rata usia kawin pertama wanita

yang ingin dicapai sebagai tolok ukur penilaian keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan Tujuan dan Sasaran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purwakarta.

B. CAPAIAN KINERJA

Berikut adalah ringkasan atas capaian target kinerja yang dihasilkan pada TriwulanI II III dan IV Tahun 2024

Tabel 2.1

Capaian Kinerja Bidang Pembangunan Ketahanan Keluarga Kabupaten Purwakarta

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 sebagai berikut :

SASARAN/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUNAN	Target Per Tribulan				Realisasi Per Tribulan				Jumlah	Capaian
			I	II	III	IV	I	II	III	IV		
Meningkatnya Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan dan Keluarga Berencana	Jumlah Unit Sarana KelompokKegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR,BKL,PPKS,PIK-RdanUsaha PeningkatanPendapatanKeluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia	25 Kelompok BKB			25					25		1%
	Jumlah kader yang mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	768 kelompok		768	768	768		768	768	768		100%
	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor(UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan	2304 orang/kader		2304	2304	2304		2304	2304	2304		100%
	Jumlah Laporan PendayagunaanMitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional	5 Kegiatan		1	1			1	1			45%
	Pembinaan Program Ketahanan danKesejahteraanKeluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	5		3								75%
	JumlahOrganisasiyangMengikuti PeningkatanKapasitasMitra dan OrganisasiKemasyarakatandala m Pengelolaan Program Ketahanan danKesejahteraanKeluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	34 Kampung KB		34	34	34		34	34	34		100%

Tabel 2.2
Capaian Anggaran Pembangunan Ketahanan Keluarga
Berencana Kabupaten Purwakarta Tahun 2024

NO	KEGIATAN	Anggaran Rp.	Target				Realisasi				Jumlah	Capaian
			I	II	III	IV	I	II	III	IV		
1	Pelaksanaan PembangunanKeluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan KesejahteraanKeluarga	5.388.400.000	483.840.000	1.701.520.000	1.751.520.000	1.451.520.000	483.840.000	1.701.520.000	1.751.520.000	1.451.520.000	5.388.400.000	100%
2.	Pelaksnaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kot a dalam Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	1.379.750.000		458.980.000	177.950.000	571.790.000		458.980.000	177.950.000	571.790.000	1.208.720.000	87%
JUMLAH		6.768.150.000	483.840.000	2.160.500.000	2.023.310.000	2.023.310.000	483.840.000	483.840.000	2.160.500.000	2.023.310.000	6.597.120.000	97.47%

C. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA

Dalam rangka mendorong pelaksanaan pencapaian target dalam sasaran startegis sebagaimana diuraikan dalam perjanjian kinerja maka, berikut adalah uraian Meningkatnya kualitas kampung KB, Meningkatnya kualitas Balita, Anak dan Remaja, Meningkatnya kualitas kelompok usaha kecil sebagai berikut:

1. Seluruh Target sudah dilaksanakan sesuai dengan target per triwulan dengan target hasil akhir mencapai target pada dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2. Mengevaluasi setiap indikator yang sudah dilaksanakan perteriwulan maupun akhir tahun untuk menimbang keberhasilan target tersebut pada Dinas Pengendalian Penduduk dan keluarga

D. RENCANA TINDAK LANJUT

Dalam meningkatkan kapabilitas guna mencapai target kinerja Bidang Pembangunan ketahanan keluarga guna mencapai target kinerja, dengan berkoordinasidengan pihak-pihak terkait.

1. Melaksanakan Monitoring setiap Kegiatan pembinaan Kader di seluruh wilayahkabupaten Purwakarta
2. Meningkatkan Kapsitas para petugas penyuluh Kb untuk memenuhi targetindikator tersebut.
3. Mengevaluasi setiap kegiatan pertriwulan pada Program PembangunanKetahanan Keluarga

E. TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG

	Laporan kurang baik
	Laporan sudah baik
	Target dan realisasi diteliti ulang Capaian diteliti ulang
	Lain-lain.....

BAB III

PENUTUP

Laporan Kinerja Triwulan Tahun 2024:

1. Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bidang Pembangunan ketahanan keluarga pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana kabupaten purwakarta berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2023 akan dilaksanakan sebagaimana jadwal yang sudah ditentukan.
2. Dalam pencapaian sasaran yang diperjanjikan, rata-rata mencapai target karena kegiatan dilaksanakan pada perTriwulan.

Purwakarta Desember 2024

Kepala Bidang Pembangunan
ketahanan keluarga

KARWASIH,S.Kep.Ners,MM
Nip.19808132008012035